

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

Oleh:

Charli Andreas Saragih

Pembimbing : Vince Ratnawati dan Rheny Afriana Hanif

Faculty Economics of Riau University, Pekanbaru, Indonesia

E-mail : charliandreassrg@yahoo.com

*The Influence of Regional Financial Statements and Financial Statement
Accessibility on Financial Management Accountability and Transparency
in Simalungun District*

ABSTRACT

This study aims to test the effect of regional financial statement presentation and accessibility of financial statement for transparency and accountability in financial management. The study was conducted in Simalungun district. Sample in this research are employee of SKPD in Government of Simalungun. The sampling technique using purposive sampling method and there are 62 respondents. The data of this research using primary data directly through a questionnaire and analyzed using SPSS 17. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear regression analysis approach with tools statistical program, after test the classical assumption are met. The results of this study show that the presentation of the financial report and accessibility of financial report influences on transparency and accountability of financial management of the district.

Keyword: financial, accessibility, transparency, and accountability

PENDAHULUAN

Transformasi tata pemerintahan di Indonesia menjadi bersifat desentralisasi terjadi setelah dikeluarkannya undang-undang No. 22/1999 (sudah digantikan UU No. 32/2004) dan undang-undang No. 25/1999 (sudah digantikan UU No. 33/2004). Dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dalam

rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab.

Sebagai salah satu konsekuensi atas berlakunya peraturan-peraturan tersebut, maka pemerintah daerah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangannya. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu

menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanah rakyat (Mulyana, 2006).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian, 2009:15). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010:18).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta

pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2009:21).

Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk pertanggungjawaban sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2013:126).

Pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan efektif. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) disajikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas LKPD Kabupaten Simalungun mendapatkan opini tidak memberikan pendapat.

Penyajian pelaporan keuangan daerah mengharuskan pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Akan tetapi, upaya penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus mengandung informasi yang relevan dan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Salah satu alat untuk memfasilitasi supaya terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah.

Komponen penyajian laporan keuangan menurut PP No. 24 tahun 2005 terdiri dari, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian direvisi menjadi PP No. 71 tahun 2010 yaitu penyajian laporan keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan atas Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pemerintah daerah harus bisa

menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif informasi dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain : relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2009) yang menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Semakin mudah masyarakat mengakses laporan keuangan maka akan tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Seperti hasil penelitian Aliyah (2012) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berbeda

dengan hasil penelitian Sastra (2013) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan refleksi dari penelitian Sagala (2011) yang meneliti tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sampel dalam penelitian ini adalah SKPD di Kabupaten Simalungun. Dari paparan diatas maka peneliti akan menguji dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2)apakah pengaruh penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah: 1)Untuk mengetahui bagaimana penyajian neraca dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD di Kabupaten Simalungun. 2)Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan SKPD terhadap tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. 3)Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.

TELAAH PUSTAKA

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholders* dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan pertanggungjawaban periode yang lalu. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahannya.

Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.

Penyajian Laporan keuangan daerah

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawab dan pengelolaan (Mardiasmo, 2002:78). Menurut PP No. 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009:159)

Menurut Halim(2013:78) laporan keuangan daerah dapat

diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 24 Tahun 2005). Menurut *Governmental accounting Standard Board (GASB, 1998)* tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah:

1. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik.
2. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting.

Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dimasa mendatang. Pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010:18). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Seperti hasil yang ditemukan oleh Aliyah (2012) bahwa pengaruh penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penelitian ini mendukung hasil penelitian Sagala (2011) yang menyatakan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, disajikan dengan lengkap dan jujur maka laporan keuangan akan transparan dan

akuntabel. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Yang berarti pula bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada pihak pengguna secara luas atas laporannya melalui internet, surat kabar atau media lain.

Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan informasi publik

adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Menurut Yani (2009), pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komperhensif kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah. Keterbukaan informasi sangat penting guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani (2013) pada pemerintahan Kota Bandung menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Pasaribu (2011) di SKPD Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan

menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten simalungun dengan jumlah 31 SKPD.

Sampel dalam penelitian ini adalah kepala SKPD dan kepala subbagian keuangan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Simalungun. Pengambilan sampel (*sampling method*) terhadap responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel secara tidak acak.

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada Kepala SKPD dan kepala Subbagian Keuangan SKPD di Kabupaten Simalungun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

a = konstanta

b₁, b₂, b₃ = koefisien regresi

X₁ = penyajian laporan keuangan

X₂ = aksesibilitas laporan keuangan daerah

Y = transparansi dan akuntabilitas
E = standar error

Definisi Operasional dan pengukuran variabel

Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan segala pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat dilihat dan diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sagala (2011) dengan indikator memenuhi standar, konsisten dan layak, informative, akurat, lengkap, pertanggungjawaban dan pengawasan. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap setuju dan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang di ajukan dengan skor 1 (SS=sangat setuju) skor 2 (S= setuju) skor 3 (TT= tidak tahu) skor 4 (TS= tidak setuju) dan skor 5 (STS= sangat tidak setuju).

Penyajian laporan keuangan daerah

Penyajian laporan keuangan daerah adalah penyajian laporan daerah menyangkut keuangan berkenaan atas hasil penegelolaan keuangannya yang meliputi aset, utang, dan ekuitas dana. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sagala (2011) dan yang menjadi indikator adalah: bermanfaat, tepat waktu,

lengkap, andal, relevan dan dapat dipahami. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap setuju dan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang di ajukan dengan skor 1 (SS=sangat setuju) skor 2 (S= setuju) skor 3 (TT= tidak tahu) skor 4 (TS= tidak setuju) dan skor 5 (STS= sangat tidak setuju).

Aksesibilitas laporan keuangan daerah

Aksesibilitas laporan keuangan daerah adalah kemudahan yang diberikan dalam hal mencari informasi mengenai laporan keuangan daerah. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Nasution (2009). dan yang menjadi indikator dalam variabel ini adalah: kemudahan, keterbukaan dan *accessible*. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap setuju dan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang di ajukan dengan skor 1 (SS=sangat setuju) skor 2 (S= setuju) skor 3 (TT= tidak tahu) skor 4 (TS= tidak setuju) dan skor 5 (STS= sangat tidak setuju).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan demografi

Kuesioner yang disebar sejumlah 62 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar peneliti, jumlah kuesioner yang diterima kembali dan dapat diolah adalah 56 kuesioner. Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 62 orang. Responden yang berumur 20-30 tahun berjumlah 1 orang (1,8%), untuk responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 10

orang (17,9%), responden yang berumur 41-50 tahun berjumlah 25 orang (44,6%), dan responden yang berumur dari 51-60 tahun sebanyak 20 orang (35,7%).

Responden yang berjenis kelamin laki-laki mendominasi yaitu sebanyak 34 orang (60,7%), responden yang berjenis kelamin perempuan hanya berjumlah 22 orang (39,3%).

Untuk responden berdasarkan jenjang pendidikan, didapat bahwa responden yang memiliki jenjang pendidikan SLTA sebanyak 10 orang (17,9%) untuk responden yang memiliki jenjang pendidikan D3 sebanyak 1 orang (1,8%), untuk responden yang memiliki jenjang pendidikan S1 sebanyak 30 orang (53,6%), dan responden yang memiliki jenjang pendidikan S2 sebanyak 15 orang (26,7%).

Untuk responden berdasarkan lamanya menjabat di SKPD terkait, didapat hasil bahwa responden yang menjabat < 5 tahun sebanyak 6 orang (10,7%), responden yang menjabat selama 5-10 tahun sebanyak 8 orang (14,3%), responden yang menjabat selama >10 tahun sebanyak 42 orang (75%).

Tabel 1
Hasil Data Deskriptif

	N	Minim um	Maxi mum	Mean	Std. Deviat ion
Penyajian laporan	56	7	16	11,1964	2,61756
Aksesibilitas	56	3	9	5,1429	1,43246
Transparansi dan Akuntabilitas	56	8	22	14,3214	3,14560
Valid N (listwise)	56				

Sumber : Data Olahan, 2015

a. Penyajian laporan keuangan (X_1)

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 7 nilai maksimum 16 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11,1964 dengan standar deviasi sebesar 2,61756. Nilai rata-rata 11,1964 menunjukkan bahwa besarnya penyajian laporan sebesar 11,1964. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi penyajian laporan ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

b. Aksesibilitas (X_2)

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum 9 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5,1429 dengan standar deviasi sebesar 1,43246. Nilai rata-rata 5,1429 menunjukkan bahwa besarnya aksesibilitas sebesar 5,1429. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi aksesibilitas ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

c. Transparansi dan akuntabilitas (Y)

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum 22 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 14,3214 dengan standar deviasi sebesar 3,14560. Nilai rata-rata 14,3214 menunjukkan bahwa besarnya transparansi dan akuntabilitas sebesar 14,3214. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi transparansi dan akuntabilitas ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

Hasil Pengujian Kualitas Data

Hasil Uji Validitas Data

Di mana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 18 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n - 2$ dengan α 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2011:53). Dalam penelitian ini $df = n-2$ ($56-2$) = 54, sehingga didapat r tabel untuk df (54) = 0,263. nilai r hitung untuk masing-masing pernyataan bahwa penyajian laporan keuangan daerah adalah berkisar antara (0,450) sampai (0,707). Hasil uji validitas untuk aksesibilitas adalah berkisar antara (0,490) sampai (0,616). Hasil uji validitas untuk transparansi dan akuntabilitas adalah berkisar antara (0,475) sampai (0,707). Semua nilai r hitung untuk masing-masing pernyataan tentang penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas lebih besar dari r table (0,263). Hal ini berarti bahwa setiap butir pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid karena *pearsoan correlation* lebih besar dari R table.

Hasil Uji Realibilitas Data

Berdasarkan hasil uji realibilitas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan transparansi antara lain 0,843, 0,737, 0,849. Dari semua nilai ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Normalitas Data

Tabel 2

Hasil uji Kolmogorov Smirnov

		Unstandarized Residual
	N	56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.Deviation	2,10090602
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,076
	Negative	-,071
	Kolmogorov-Smirnov Z	,572
	Asym. Sig. (2-tailed)	,899

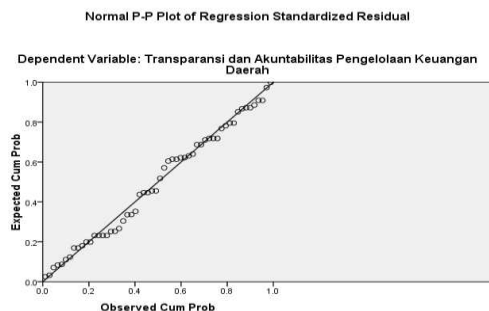
Sumber: Data Olahan 2015

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data.

Berdasarkan uji Kolmogorov-smirnov diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,899 > 0,05$.

Gambar 1
Hasil uji P- Plot



Sumber : Data Olahan 2015

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa data tersebar di sekitar garis diagonal (tidak terpencar dari garis diagonal). Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji t dan Uji R^2 dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik Hasil Pengujian Multikolinearitas

Table 3
Nilai *Tolerance* dan VIF

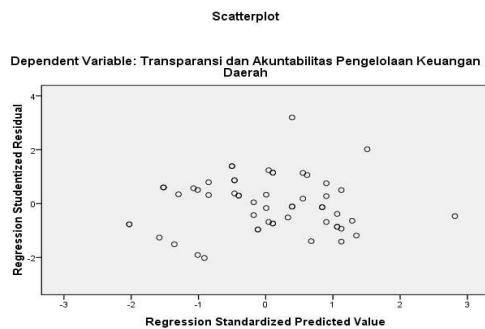
Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penyajian laporan keuangan	.978	1.022
Aksesibilitas	.978	1.022

Sumber: Data Olahan 2015

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi

Hasil uji Heteroskedastisitas

Gambar 2
Hasil uji Scatterplot



Sumber: Data Olahan 2015

Dari gambar scatterplot di atas ini menunjukkan gambar hasil uji heteroskedastisitas, dari gambar grafik *Scatterplot* di atas ini terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas

Hasil Pengujian Autokorelasi

Tabel 4

Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	Kesimpulan
1	.774 ^a	.554	.537	2.14018	2.103	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan hasil di atas diketahui nilai d_{hitung} (Durbin Watson) terletak antara d_U dan $4-d_U = 1,643 < 2,103 < 2,357$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 5

Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,333	2,336		1,522	,134
Penyajian laporan keuangan daerah	,523	,111	,435	4,695	,000
Aksesibilitas laporan keuangan daerah	1,192	,204	,543	5,851	,000

Sumber: Data Olahan 2015

Persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,333 + 0,523 X_1 + 1,192 X_2 + e$$

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hasil Uji Kelayakan Model (*Goodness Of Fit*)

Tabel 6
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.744 ^a	.554	.537	2.14018

Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai R square (R^2) sebesar 0.554 dan nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0,537. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas adalah sebesar 55,4%. Sedangkan sisanya 44,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (H_1)

Dari hasil penghitungan SPSS 17,0 for windows diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,695 > 2,006$ dengan nilai signifikansi diperoleh adalah $0,000 < 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu H_1 : penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah

daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur sehingga laporan keuangan akan transparan dan akuntabel. Hal ini disebabkan karena didalam laporan keuangan daerah memuat informasi yang memadai untuk melihat hasil penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sagala (2011) yang mengemukakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2012) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (H_2)

Dari hasil perhitungan SPSS 17,0 for windows diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,851 > 2,006$ dengan nilai signifikan diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ (signifikan). dari hasil pengujian terlihat, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu H_2 : Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh secara parsial terhadap

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses kepada para pengguna laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Hal ini harus diikuti dengan kemampuan setiap SKPD untuk memberikan akses yang mudah dan jelas kepada setiap pengguna laporan keuangan daerah yang membutuhkan. Keterbukaan informasi yang diberikan Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD sangatlah penting guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan mustofa (2012) yang menyatakan bahwa aksesibilitas mempunyai pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tetapi bertolak belakang dengan Sastra (2013) yang menyimpulkan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketidak konsistenan penelitian ini dengan penelitian sastra (2013) dapat disebabkan karena hasil jawaban responden yang berbeda.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini, menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain : Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur maka laporan keuangan akan transparansi dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh sagala(2011) yang mengemukakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadi memberikan kemudahan akses kepada para pengguna laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan mustofa(2012) Hasil penelitian menyatakan bahwa aksesibilitas mempunyai pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan Penelitian

Pengumpulan data melalui kuesioner dibutuhkan waktu dan tenaga yang memadai untuk mengirim ke responden terpilih. Beberapa responden tidak mengembalikan jawaban kuesioner, demikian juga

waktu pengembalian tidak dapat ditentukan. Hal ini berdampak pada jumlah data penelitian yang dapat diperoleh belum maksimal. Penelitian ini hanya menggunakan variabel pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan 62 responden

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya SKPD yang terdapat di kabupaten Simalungun saja namun diperluas lagi. Untuk SKPD yang ada di Kabupaten Simalungun terutama pimpinan SKPD supaya bisa melakukan pembahasan atau sosialisasi dengan para staf bagian keuangan bahwa perlunya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan SKPD supaya masyarakat bisa mengakses atau mengetahui secara rinci laporan keuangan tersebut. Dari nilai *R square* hasil perhitungan ada beberapa variabel yang dapat dikembangkan di penelitian selanjutnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga pada penelitian yang akan datang perlu dikembangkan lagi dengan menggunakan variabel lainnya seperti Efektivitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah serta variabel-variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti 2012. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara, *jurnal akuntansi dan auditing*. Vol.8.No.2. 2012
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta.
- Governmental Accounting Standard Board, 1998, *Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*. GASB, Norwalk, Conn.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2 No.1, mei 2006.
- Musthofa, Anis Iqbal. 2012. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.1.No.1.2012

- Nasution, Saufi Iqbal. 2009. Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. USU
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Pasaribu, Frans Judika. 2012. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi* Universitas Sumatra Utara.
- Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah daerah (Survey Pada Pemda di Jawa Tengah), *Jurnal Akuntansi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Sastra, Yuni. 2013. pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota medan. *skripsi* universitas medan.
- Sagala, Marjuki. 2011, Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah samosir. *Skripsi* Universitas Sumatra Utara.
- Sande, Peggi. 2013. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (studi empiris pada provinsi sumatra barat). *Jurnal Akuntansi*, universitas negri padang
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. Concept Paper 2: *Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-Undang No. 32, 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- www.bpk.com

